

Media Online	Kedu.suaramerdeka.com
Tanggal	09 Juni 2024
Wilayah	Kabupaten Purworejo



Layanan Radioterapi di RSUD Purworejo Senilai Rp 70 miliar Dipersiapkan, DPRD Soroti Sejumlah Poin

<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2112872413/layanan-radioterapi-di-rsud-purworejo-senilai-rp-70-miliar-dipersiapkan-dprd-soroti-sejumlah-poin>

PURWOREJO, suaramerdeka-kedu.com – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo saat ini tengah merencanakan dan mempersiapkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan Radioterapi (terapi radiasi kanker) senilai sekitar Rp 70 miliar.

Saat ini proses masih pada tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Purworejo. RDP telah dilaksanakan di gedung B DPRD, Jumat (31/5) lalu.

Dalam RDP tersebut, DPRD Purworejo memberikan sorotan terhadap beberapa poin dalam rencana pengadaan layanan Radioterapi.

"Persiapan saja, pembangunan Radio Terapi, kita dengar pendapat dengan dewan terkait persiapan radio terapi, untuk melengkapi pelayanan kami di bidang Kanker. Sekarang Kemenkes melakukan transformasi di bidang layanan rujukan, bahwa ada 4 penyakit utama yang harus diatasi yaitu Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi (Urologi dan Ginjal)," kata Direktur RSUD dr Tjitrowardojo, Tolkha Amaruddin, usai RDP.

Layanan Radioterapi ini, lanjutnya, adalah pengembangan utama untuk arah transformasi rumah sakit. Kedepan RS tidak berdasar kelas tetapi kompetensi atau kemampuan layanan.

"Kita saat ini masih Madya karena (layanan kanker) hanya bedah Onkologi dan Kemoterapi, tetapi nanti jika ada Radioterapi kita naik menjadi Utama," ungkapnya.

Radioterapi sendiri, kata Tolkha, adalah terapi penyinaran sel-sel kanker. Selain kemoterapi dan operasi, Radioterapi merupakan salah satu pelayanan bagi pasien kanker.

"Biasanya kombinasi, ada yang hanya kemoterapi saja, ada yang radioterapi saja, tapi ada juga yang harus dua-duanya, ditambah dioperasi juga," sebutnya.

Lebih lanjut, kata Tolkha, pengadaan layanan Radioterapi ini tergolong mahal. Maka dari itu RSUD Tjitrowardojo akan menggandeng pihak ketiga dalam pengadaan layanan ini. Dengan kerjasama itu, maka tidak perlu mengeluarkan APBD dalam pengadaan, tetapi nantinya harus ada bagi hasil dengan pihak ketiga yang memberikan investasi untuk pengadaan layanan Radioterapi.

"Untuk saat ini dengan keterbatasan, ini bisanya dengan kerjasama operasional (KSO), karena biaya besar dan perawatan cukup sulit, kalau kita beli, nanti rusak, perawatannya yang kita repot. Iya mungkin total sekitar Rp 70 miliar, peralatan sama gedungnya. Kerjasama dengan mitra (pihak ketiga), pengelola SDM dari kita semua, mereka alat dan bangunan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi mengatakan, dalam hal ini DPRD melihat dari beberapa perspektif.

"Kalau dari segi pelayanan kami sangat mendukung, bahwa di Purworejo, soal Radioterapi, selama ini pasien penderita kanker harus banyak lari ke luar kota. Tentu harapannya dengan dibukanya pelayanan Radioterapi ini bisa meringankan beban pasien penderita kanker di Purworejo, meringankan biaya operasional," jelasnya.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan DPRD. Salah satunya dari segi ekonomi, atau pendapatan rumah sakit.

"Yang kami soroti dari segi ekonominya, karena namanya BLUD ini kan ada pendapatan, kami perlu dipaparkan terlebih dahulu secara pendapatan, dari segi pendapatan, apa yang direncanakan saya kira cukup masuk akal. Karena KSO ini tidak membutuhkan persetujuan DPRD, itu ranahnya memang murni di BLUD, dan itu ranahnya tentu Bupati. Kami disini sebagai lembaga kontrol coba memberi masukan," jelasnya.

Baca Juga:

10 Tahun Mengabdikan di DPRD, Dion Agasi Mantap Maju Pilkada Purworejo

DPRD Purworejo juga memberikan saran dari perspektif hukum. Pihaknya berharap kedepan ada dasar hukum tersendiri soal kerjasama operasional atau KSO.

"Bagaimana Perbup yang menjadi dasar itu terkait kerjasama operasional, itu sampai sekarang belum ada, jadi dasarnya menggunakan Perbup Pengadaan Barang dan Jasa, walaupun disitu juga ada klausul tentang kerjasama operasional, tetapi harapan kami sebagai turunan dari Permendagri nomor 79, ini segera disusuli dengan Perbup yang mengatur tentang kerjasama operasional, tujuannya untuk menjaga semuanya," paparnya.

Meski mendapat sorotan, namun dari segi ekonomi menurut Dion pengadaan layanan Radioterapi dengan sistim KSO ini cukup masuk akal.

"Sistimnya bagi hasil, jadi tidak mengeluarkan modal (dari APBD), pihak ketiga atau mitra ini memberi investasi berupa alat dan gedung, nah gedungnya ini setelah 10 tahun juga akan dihibahkan ke RSUD, hanya alatnya tetap milik mereka. Bagi hasilnya seperti apa itu ranahnya disana. Tadi kalau dari yang dipaparkan disini saya kira cukup masuk akal dari nilai manfaat ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita memang memungkinkan untuk membangun sendiri, ini keuntungannya akan lebih besar," pungkasnya.